



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2019

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.

3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap Desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar Kabupaten Sanggau dibagi Jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi formula setiap Desa
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Sanggau
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Sanggau
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Sanggau
Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa terhadap Indeks Kesulitan Geografis Desa Kabupaten Sanggau
AF Kab = Alokasi formula Kabupaten Sanggau

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 8

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari kepala desa.

- (6) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa tahap III dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian

output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.

- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dan laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), kepala desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), ayat (5) atau ayat (6);
 - b. Terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan

oleh aparat pengawas fungsional daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.

- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Desa dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada kepala desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah

dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen).

- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 2 Januari 2019
BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 2 Januari 2019

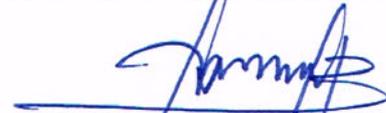
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2019 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



YAKOBUS, SH, MH
Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 45 TAHUN 2019

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2019

Kecamatan	Desa	Jumlah Dana Desa	
1	2	3	
SANGGAU KAPUAS		149.860.398.000	
		16.439.566.000	
	1	PENYELADI	801.727.000
	2	NANGA BIANG	794.441.000
	3	RAMBIN	978.705.000
	4	ENTAKAI	893.814.000
	5	PANA	809.385.000
	6	MENGGIANG	790.450.000
	7	KAMBONG	813.055.000
	8	SUNGAI MAWANG	774.367.000
	9	LAPE	797.001.000
	10	PENYELIMAU	838.765.000
	11	SUNGAI ALAI	843.707.000
	12	SEMERANGKAI	825.932.000
	13	SUNGAI BATU	895.883.000
	14	SUNGAI MUNTIK	818.649.000
	15	LINTANG KAPUAS	785.296.000
	16	LINTANG PELAMAN	893.897.000
	17	BELANGIN	768.636.000
	18	PENYELIMAU JAYA	761.392.000
	19	TAPANG DULANG	767.886.000
20	BOTUH LINTANG	786.578.000	
MUKOK		7.175.461.000	
	1	KEDUKUL	761.775.000
	2	SEMUNTAI	806.851.000
	3	ENKODE	826.703.000
	4	SUNGAI MAWANG	860.356.000
	5	INGGIS	779.695.000
	6	LAYAK OMANG	812.804.000
	7	SEMANGGIS RAYA	752.830.000
	8	TRI MULYA	754.900.000
9	SERAMBAI JAYA	819.547.000	
NOYAN		6.635.398.000	
	1	NOYAN	1.005.814.000
	2	EMPOTO	911.929.000
	3	SEMONGAN	1.714.893.000
	4	SUNGAI DANGIN	937.543.000
5	IDAS	2.065.219.000	
JANGKANG		15.352.056.000	
	1	BALAI SEBUT	819.593.000
	2	JANGKANG BENUA	1.749.038.000
	3	TANGGUNG	1.031.562.000
	4	EMPIYANG	1.792.601.000
5	PISANG	1.556.081.000	

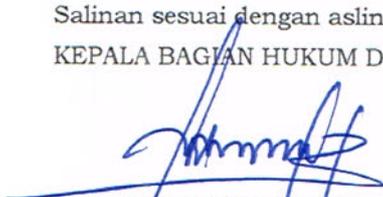
Kecamatan	Desa	Jumlah Dana Desa
1	2	3
	6 KETORI	2.058.129.000
	7 SEMOMBAT	1.754.406.000
	8 TERATI	1.237.454.000
	9 SAPE	796.355.000
	10 SELAMPUNG	828.970.000
	11 SEMIRAU	1.727.867.000
BONTI		8.778.941.000
	1 BONTI	815.600.000
	2 SAMI	839.614.000
	3 BAHTA	975.887.000
	4 UPE	976.360.000
	5 TUNGGUL BOYOK	834.206.000
	6 EMPODIS	909.682.000
	7 KAMPUH	944.237.000
	8 BANTAI	1.309.810.000
	9 MAJEL	1.173.545.000
BEDUWAI		4.624.787.000
	1 KASRO MEGO	927.637.000
	2 BERENG BERKAWAT	805.619.000
	3 MUARA ILAI	901.228.000
	4 THANG RAYA	925.976.000
	5 MAWANG MUDA	1.064.327.000
SEKAYAM		9.573.953.000
	1 BALAI KARANGAN	852.070.000
	2 PENGADANG	918.827.000
	3 SOTOK	894.650.000
	4 KENAMAN	875.195.000
	5 RAUT MUARA	904.736.000
	6 ENKAHAN	893.741.000
	7 BUNGKANG	919.802.000
	8 LUBUK SABUK	946.400.000
	9 SANGAI TEKAM	860.031.000
	10 MELENGGANG	1.508.501.000
KEMBAYAN		9.245.432.000
	1 TANJUNG BUNGA	946.332.000
	2 SEMAYANG	870.892.000
	3 SEBONGKUH	824.689.000
	4 KUALA DUA	770.695.000
	5 TANJUNG MERPATI	808.827.000
	6 SEJUAH	856.893.000
	7 MOBUI	794.110.000
	8 TANAP	865.546.000
	9 SEBUDUH	893.223.000
	10 KELOMPU	811.540.000
	11 TUNGGAL BHAKTI	802.685.000

Kecamatan	Desa	Jumlah Dana Desa
1	2	3
BALAI		10.231.870.000
	1 HILIR	869.718.000
	2 PADI KAYE	792.100.000
	3 TEMIANG MALI	812.379.000
	4 COWET	781.182.000
	5 KEBADU	908.477.000
	6 MAK KAWING	824.496.000
	7 TAE	835.014.000
	8 SEMONCOL	895.435.000
	9 EMPIRANG UJUNG	808.600.000
	10 BULU BALA	999.225.000
	11 TEMIANG TABA	840.272.000
12 SENYABANG	864.972.000	
TOBA		6.201.553.000
	1 TERAJU	919.774.000
	2 BELUNGAI DALAM	823.192.000
	3 SANSAT	969.488.000
	4 KAMPUNG BARU	863.917.000
	5 BAGAN ASAM	935.339.000
	6 LUMUT	844.077.000
7 BALAI BELUNGAI	845.766.000	
MELIAU		16.754.983.000
	1 MELIAU HILIR	947.112.000
	2 MELIAU HULU	954.367.000
	3 KUALA BUAYAN	823.945.000
	4 MERANGGAU	930.454.000
	5 MELOBOK	889.324.000
	6 SUNGAI MAYAM	812.296.000
	7 PAMPANG DUA	791.246.000
	8 KUALA ROSAN	1.155.508.000
	9 SUNGAI KEMBAYAU	816.494.000
	10 KUNYIL	941.452.000
	11 CUPANG	846.689.000
	12 LALANG	951.158.000
	13 BARU LOMBAK	896.141.000
	14 ENGGADAI	841.169.000
	15 BALAI TINGGI	985.094.000
	16 BHAKTI JAYA	788.356.000
	17 MUKTI JAYA	811.419.000
	18 MELAWI MAKMUR	794.011.000
19 HARAPAN MAKMUR	778.748.000	

Kecamatan	Desa	Jumlah Dana Desa
1	2	3
PARINDU		11.264.786.000
	1 PUSAT DAMAI	807.522.000
	2 MAJU KARYA	842.006.000
	3 SEBARA	768.299.000
	4 PANDU RAYA	811.161.000
	5 EMBALA	873.605.000
	6 HIBUN	780.361.000
	7 MARINGIN JAYA	798.880.000
	8 SUKA MULYA	787.912.000
	9 PALEM JAYA	819.301.000
	10 RAHAYU	820.832.000
	11 DOSAN	809.130.000
	12 SUKA GERUNDI	792.923.000
	13 GUNAM	759.606.000
	14 MARITA	793.248.000
TAYAN HULU		9.538.868.000
	1 SOSOK	1.018.472.000
	2 PERUAN DALAM	829.568.000
	3 MENYABO	922.151.000
	4 MANDONG	816.456.000
	5 JANJANG	834.801.000
	6 RIYAI	799.983.000
	7 BERAKAK	834.607.000
	8 ENKASAN	1.025.140.000
	9 PANDAN SEMBUAT	869.603.000
	10 BINJAI	780.870.000
11 KEDAKAS	807.217.000	
TAYAN HILIR		13.004.957.000
	1 PULAU TAYAN UTARA	828.782.000
	2 KAWAT	787.257.000
	3 PEDALAMAN	909.211.000
	4 BALAI INGIN	945.879.000
	5 LALANG	966.479.000
	6 CEMPEDAK	877.791.000
	7 MELUGAI	891.879.000
	8 EMBERAS	858.593.000
	9 BEGINJAI	835.944.000
	10 SEJOTANG	978.942.000
	11 SEBEMBAN	782.000.000
	12 SUBAH	812.489.000
	13 SUNGAI JAMAN	931.018.000
	14 TANJUNG BUNUT	834.921.000
15 TEBANG BENUA	763.772.000	

Kecamatan	Desa	Jumlah Dana Desa
1	2	3
ENTIKONG		5.037.787.000
	1 NEKAN	909.350.000
	2 SEMANGIT	892.532.000
	3 ENTIKONG	1.026.742.000
	4 PALA ASANG	1.018.459.000
	5 SURUH TEMBAWANG	1.190.704.000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, SH, MH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 2 TAHUN 2019

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIA DESA
DI KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Pagu per Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) + (5) + (6)
1	KAPUAS	PENYELADI	672,421,000	129,306,000	0	801,727,000
2	KAPUAS	NANGA BIANG	672,421,000	122,020,000	0	794,441,000
3	KAPUAS	RAMBIN	672,421,000	306,284,000	0	978,705,000
4	KAPUAS	ENTAIKAI	672,421,000	221,393,000	0	893,814,000
5	KAPUAS	PANA	672,421,000	136,964,000	0	809,385,000
6	KAPUAS	MENGGIANG	672,421,000	118,029,000	0	790,450,000
7	KAPUAS	KAMBONG	672,421,000	140,634,000	0	813,055,000
8	KAPUAS	SUNGGAI MAWANG	672,421,000	101,946,000	0	774,367,000
9	KAPUAS	LAPE	672,421,000	124,580,000	0	797,001,000
10	KAPUAS	PENYELIMAU	672,421,000	166,344,000	0	838,765,000
11	KAPUAS	SUNGGAI ALAI	672,421,000	171,286,000	0	843,707,000
12	KAPUAS	SEMERANGKAI	672,421,000	153,511,000	0	825,932,000
13	KAPUAS	SUNGGAI BATU	672,421,000	223,462,000	0	895,883,000
14	KAPUAS	SUNGGAI MUNTIK	672,421,000	146,228,000	0	818,649,000
15	KAPUAS	LINTANG KAPUAS	672,421,000	112,875,000	0	785,296,000
16	KAPUAS	LINTANG PELAMAN	672,421,000	221,476,000	0	893,897,000
17	KAPUAS	BELANGIN	672,421,000	96,215,000	0	768,636,000
18	KAPUAS	PENYELIMAU JAYA	672,421,000	88,971,000	0	761,392,000
19	KAPUAS	TAPANANG DULANG	672,421,000	95,465,000	0	767,886,000
20	KAPUAS	BOTUH LINTANG	672,421,000	114,157,000	0	786,578,000
21	MUKOK	KEDUKUL	672,421,000	89,354,000	0	761,775,000
22	MUKOK	SEMUNTAI	672,421,000	134,430,000	0	806,851,000

23	MUKOK	ENGGKODE	672,421,000	154,282,000	0	826,703,000
24	MUKOK	SUNGGAI MAWANG	672,421,000	187,935,000	0	860,356,000
25	MUKOK	INGGIS	672,421,000	107,274,000	0	779,695,000
26	MUKOK	LAYAK OMANG	672,421,000	140,383,000	0	812,804,000
27	MUKOK	SEMANGGIS RAYA	672,421,000	80,409,000	0	752,830,000
28	MUKOK	TRI MULYA	672,421,000	82,479,000	0	754,900,000
29	MUKOK	SERAMBAL JAYA	672,421,000	147,126,000	0	819,547,000
30	NOYAN	NOYAN	672,421,000	333,393,000	0	1,005,814,000
31	NOYAN	EMPOTO	672,421,000	239,508,000	0	911,929,000
32	NOYAN	SEMONGAN	672,421,000	619,894,000	422,578,000	1,714,893,000
33	NOYAN	SUNGGAI DANGIN	672,421,000	265,122,000	0	937,543,000
34	NOYAN	IDAS	672,421,000	1,181,509,000	211,289,000	2,065,219,000
35	JANGKANG	BALAI SEBUT	672,421,000	147,172,000	0	819,593,000
36	JANGKANG	JANGKANG BENUA	672,421,000	865,328,000	211,289,000	1,749,038,000
37	JANGKANG	TANGGUNG	672,421,000	359,141,000	0	1,031,562,000
38	JANGKANG	EMPIYANG	672,421,000	697,602,000	422,578,000	1,792,601,000
39	JANGKANG	PISANG	672,421,000	672,371,000	211,289,000	1,556,081,000
40	JANGKANG	KETORI	672,421,000	963,130,000	422,578,000	2,058,129,000
41	JANGKANG	SEMOMBAT	672,421,000	659,407,000	422,578,000	1,754,406,000
42	JANGKANG	TERATI	672,421,000	565,033,000	0	1,237,454,000
43	JANGKANG	SAPE	672,421,000	123,934,000	0	796,355,000
44	JANGKANG	SELAMPUNG	672,421,000	156,549,000	0	828,970,000
45	JANGKANG	SEMIRAU	672,421,000	632,868,000	422,578,000	1,727,867,000
46	BONTI	BONTI	672,421,000	143,179,000	0	815,600,000
47	BONTI	SAMI	672,421,000	167,193,000	0	839,614,000
48	BONTI	BAHTA	672,421,000	303,466,000	0	975,887,000
49	BONTI	UPE	672,421,000	303,939,000	0	976,360,000
50	BONTI	TUNGGUL BOYOK	672,421,000	161,785,000	0	834,206,000
51	BONTI	EMPODIS	672,421,000	237,261,000	0	909,682,000
52	BONTI	KAMPUH	672,421,000	271,816,000	0	944,237,000
53	BONTI	BANTAI	672,421,000	637,389,000	0	1,309,810,000

54	BONTI	MAJEL	672,421,000	501,124,000	0	1,173,545,000
55	BEDUAI	KASRO MEGO	672,421,000	255,216,000	0	927,637,000
56	BEDUAI	BERENG BERKAWAT	672,421,000	133,198,000	0	805,619,000
57	BEDUAI	MUARA ILAI	672,421,000	228,807,000	0	901,228,000
58	BEDUAI	THANG RAYA	672,421,000	253,555,000	0	925,976,000
59	BEDUAI	MAWANG MUDA	672,421,000	391,906,000	0	1,064,327,000
60	SEKAYAM	BALAI KARANGAN	672,421,000	179,649,000	0	852,070,000
61	SEKAYAM	PENGADANG	672,421,000	246,406,000	0	918,827,000
62	SEKAYAM	SOTOK	672,421,000	222,229,000	0	894,650,000
63	SEKAYAM	KENAMAN	672,421,000	202,774,000	0	875,195,000
64	SEKAYAM	RAUT MUARA	672,421,000	232,315,000	0	904,736,000
65	SEKAYAM	ENGAHAN	672,421,000	221,320,000	0	893,741,000
66	SEKAYAM	BUNGKANG	672,421,000	247,381,000	0	919,802,000
67	SEKAYAM	LUBUK SABUK	672,421,000	273,979,000	0	946,400,000
68	SEKAYAM	SANGAI TEKAM	672,421,000	187,610,000	0	860,031,000
69	SEKAYAM	MELENGGANG	672,421,000	624,791,000	211,289,000	1,508,501,000
70	KEMBAYAN	TANJUNG BUNGA	672,421,000	273,911,000	0	946,332,000
71	KEMBAYAN	SEMAYANG	672,421,000	198,471,000	0	870,892,000
72	KEMBAYAN	SEBONGKUH	672,421,000	152,268,000	0	824,689,000
73	KEMBAYAN	KUALA DUA	672,421,000	98,274,000	0	770,695,000
74	KEMBAYAN	TANJUNG MERPATI	672,421,000	136,406,000	0	808,827,000
75	KEMBAYAN	SEJUAH	672,421,000	184,472,000	0	856,893,000
76	KEMBAYAN	MOBUI	672,421,000	121,689,000	0	794,110,000
77	KEMBAYAN	TANAP	672,421,000	193,125,000	0	865,546,000
78	KEMBAYAN	SEBUDUH	672,421,000	220,802,000	0	893,223,000
79	KEMBAYAN	KELOMPU	672,421,000	139,119,000	0	811,540,000
80	KEMBAYAN	TUNGGAL BHAKTI	672,421,000	130,264,000	0	802,685,000
81	PARINDU	PUSAT DAMAI	672,421,000	135,101,000	0	807,522,000
82	PARINDU	MAJU KARYA	672,421,000	169,585,000	0	842,006,000
83	PARINDU	SEBARA	672,421,000	95,878,000	0	768,299,000
84	PARINDU	PANDU RAYA	672,421,000	138,740,000	0	811,161,000

85	PARINDU	EMBALA	672,421,000	201,184,000	0	873,605,000
86	PARINDU	HIBUN	672,421,000	107,940,000	0	780,361,000
87	PARINDU	MARINGIN JAYA	672,421,000	126,459,000	0	798,880,000
88	PARINDU	SUKA MULYA	672,421,000	115,491,000	0	787,912,000
89	PARINDU	PALEM JAYA	672,421,000	146,880,000	0	819,301,000
90	PARINDU	RAHAYU	672,421,000	148,411,000	0	820,832,000
91	PARINDU	DOSAN	672,421,000	136,709,000	0	809,130,000
92	PARINDU	SUKA GERUNDI	672,421,000	120,502,000	0	792,923,000
93	PARINDU	GUNAM	672,421,000	87,185,000	0	759,606,000
94	PARINDU	MARTA	672,421,000	120,827,000	0	793,248,000
95	TAYAN HULU	SOSOK	672,421,000	346,051,000	0	1,018,472,000
96	TAYAN HULU	PERUAN DALAM	672,421,000	157,147,000	0	829,568,000
97	TAYAN HULU	MENYABO	672,421,000	249,730,000	0	922,151,000
98	TAYAN HULU	MANDONG	672,421,000	144,035,000	0	816,456,000
99	TAYAN HULU	JANJANG	672,421,000	162,380,000	0	834,801,000
100	TAYAN HULU	RIYAI	672,421,000	127,562,000	0	799,983,000
101	TAYAN HULU	BERAKAK	672,421,000	162,186,000	0	834,607,000
102	TAYAN HULU	ENKASAN	672,421,000	352,719,000	0	1,025,140,000
103	TAYAN HULU	PANDAN SEMBUAT	672,421,000	197,182,000	0	869,603,000
104	TAYAN HULU	BINJAI	672,421,000	108,449,000	0	780,870,000
105	TAYAN HULU	KEDAKAS	672,421,000	134,796,000	0	807,217,000
106	TAYAN HILIR	PULAU TAYAN UTARA	672,421,000	156,361,000	0	828,782,000
107	TAYAN HILIR	KAWAT	672,421,000	114,836,000	0	787,257,000
108	TAYAN HILIR	PEDALAMAN	672,421,000	236,790,000	0	909,211,000
109	TAYAN HILIR	BALAI INGIN	672,421,000	273,458,000	0	945,879,000
110	TAYAN HILIR	LALANG	672,421,000	294,058,000	0	966,479,000
111	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	672,421,000	205,370,000	0	877,791,000
112	TAYAN HILIR	MELUGAI	672,421,000	219,458,000	0	891,879,000
113	TAYAN HILIR	EMBERAS	672,421,000	186,172,000	0	858,593,000
114	TAYAN HILIR	BEGINJAI	672,421,000	163,523,000	0	835,944,000
115	TAYAN HILIR	SEJOTANG	672,421,000	306,521,000	0	978,942,000

116	TAVAN HILIR	SEBEMBAN	672,421,000	109,579,000	0	782,000,000
117	TAVAN HILIR	SUBAH	672,421,000	140,068,000	0	812,489,000
118	TAVAN HILIR	SUNGAI JAMAN	672,421,000	258,597,000	0	931,018,000
119	TAVAN HILIR	TANJUNG BUNUT	672,421,000	162,500,000	0	834,921,000
120	TAVAN HILIR	TEBANG BENUA	672,421,000	91,351,000	0	763,772,000
121	BALAI	HILIR	672,421,000	197,297,000	0	869,718,000
122	BALAI	PADI KAYE	672,421,000	119,679,000	0	792,100,000
123	BALAI	TEMIANG MALI	672,421,000	139,958,000	0	812,379,000
124	BALAI	COWET	672,421,000	108,761,000	0	781,182,000
125	BALAI	KEBADU	672,421,000	236,056,000	0	908,477,000
126	BALAI	MAK KAWING	672,421,000	152,075,000	0	824,496,000
127	BALAI	TAE	672,421,000	162,593,000	0	835,014,000
128	BALAI	SEMONCOL	672,421,000	223,014,000	0	895,435,000
129	BALAI	EMPIRANG UJUNG	672,421,000	136,179,000	0	808,600,000
130	BALAI	BULU BALA	672,421,000	326,804,000	0	999,225,000
131	BALAI	TEMIANG TABA	672,421,000	167,851,000	0	840,272,000
132	BALAI	SENYABANG	672,421,000	192,551,000	0	864,972,000
133	TOBA	TERAJU	672,421,000	247,353,000	0	919,774,000
134	TOBA	BELUNGGAI DALAM	672,421,000	150,771,000	0	823,192,000
135	TOBA	SANSAT	672,421,000	297,067,000	0	969,488,000
136	TOBA	KAMPUNG BARU	672,421,000	191,496,000	0	863,917,000
137	TOBA	BAGAN ASAM	672,421,000	262,918,000	0	935,339,000
138	TOBA	LUMUT	672,421,000	171,656,000	0	844,077,000
139	TOBA	BALAI BELUNGGAI	672,421,000	173,345,000	0	845,766,000
140	MELIAU	MELIAU HILIR	672,421,000	274,691,000	0	947,112,000
141	MELIAU	MELIAU HULU	672,421,000	281,946,000	0	954,367,000
142	MELIAU	KUALA BUAYAN	672,421,000	151,524,000	0	823,945,000
143	MELIAU	MERANGGAU	672,421,000	258,033,000	0	930,454,000
144	MELIAU	MELOBOK	672,421,000	216,903,000	0	889,324,000
145	MELIAU	SUNGAI MAYAM	672,421,000	139,875,000	0	812,296,000
146	MELIAU	PAMPANG DUA	672,421,000	118,825,000	0	791,246,000

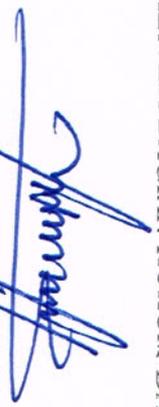
147	MELIAU	KUALA ROSAN	672,421,000	483,087,000	0	1,155,508,000
148	MELIAU	SUNGGAI KEMBAYAU	672,421,000	144,073,000	0	816,494,000
149	MELIAU	KUNYIL	672,421,000	269,031,000	0	941,452,000
150	MELIAU	CUPANG	672,421,000	174,268,000	0	846,689,000
151	MELIAU	LALANG	672,421,000	278,737,000	0	951,158,000
152	MELIAU	BARU LOMBAK	672,421,000	223,720,000	0	896,141,000
153	MELIAU	ENGGADAI	672,421,000	168,748,000	0	841,169,000
154	MELIAU	BALAI TINGGI	672,421,000	312,673,000	0	985,094,000
155	MELIAU	BHAKTI JAYA	672,421,000	115,935,000	0	788,356,000
156	MELIAU	MUKTI JAYA	672,421,000	138,998,000	0	811,419,000
157	MELIAU	MELAWI MAKMUR	672,421,000	121,590,000	0	794,011,000
158	MELIAU	HARAPAN MAKMUR	672,421,000	106,327,000	0	778,748,000
159	ENTIKONG	NEKAN	672,421,000	236,929,000	0	909,350,000
160	ENTIKONG	SEMANGIT	672,421,000	220,111,000	0	892,532,000
161	ENTIKONG	ENTIKONG	672,421,000	354,321,000	0	1,026,742,000
162	ENTIKONG	PALA ASANG	672,421,000	346,038,000	0	1,018,459,000
163	ENTIKONG	SURUH TEMBAWANG	672,421,000	518,283,000	0	1,190,704,000
Total			109,604,623,000	37,297,729,000	2,958,046,000	149,860,398,000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI


YAKOBUS, SH, MH
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 9700203 199903 1 002